

TAJUK RENCANA

Miras Berlabel Wilayah Ikonik DIY

ISU peredaran produk minuman beralkohol atau minuman keras (miras) yang mencantumkan nama-nama wilayah ikonik di DIY, seperti Kaliurang, layak menjadi perhatian semua pihak, terutama dari aparat berwenang. Masyarakat lokal Kaliurang sendiri menolak nama daerahnya dikait-kaikkan dengan produk minuman beralkohol. Masyarakat menjadi resah dan bisa berdampak ke citra investasi daerah (*KR* 23/4).

Hemat kita, fenomena peredaran minuman beralkohol yang menggunakan label Kaliurang atau wilayah ikonik lainnya di Yogya tentu sangat mengusik perasaan masyarakat Yogya. Adalah ironis ketika pemerintah daerah dan masyarakat sedang gencar-gencarnya memerangi miras, terutama yang ilegal atau tanpa izin, muncul produk baru miras berlabel Kaliurang.

Sejauh pengamatan koran ini, produk miras berlabel Kaliurang maupun wilayah ikonik lainnya di Yogya belum mengantongi legalitas merek dari Kementerian Hukum, khususnya dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Boleh jadi label tersebut telah didaftarkan, namun belum mendapatkan pengesahan, sehingga belum dapat digunakan. Seperti diketahui, dalam pendaftaran merek, ada prosedur yang harus dilalui, antara lain melalui pemeriksaan, baik menyangkut nama maupun hal-hal yang bersifat substantif.

Kalau belum ada pengesahan atau legalitas dari Kementerian Hukum, tentu merek atau label yang baru didaftarkan belum bisa digunakan, apalagi ada keberatan dari masyarakat, atau bahkan pemerintah setempat. Secara substansi, merek atas suatu produk itu tidak boleh bertentangan norma-norma yang hidup dan berkembang di masyarakat. Artinya, merek tidak boleh digunakan secara sembarangan. Berkenaan hal tersebut, kita sepa-

kat dengan sikap Pemda DIY untuk melakukan pengawasan secara lebih ketat terkait peredaran miras bermerek Kaliurang maupun wilayah ikonik lainnya di DIY. Tentu ini bukan sekadar label atau merek, melainkan juga harus dikaitkan dengan komitmen pemerintah daerah untuk membatasi peredaran minuman beralkohol. Sebab, sudah menjadi pengetahuan umum bahwa miras menjadi pemicu aksi kejahatan di DIY.

Sedang terkait peredaran miras, termasuk miras berlabel Kaliurang—bila memang ada faktanya—sebaiknya aparat bertindak tegas, dan jangan memberi toleransi. Bila ini dibiarkan, bukan tidak mungkin menjadi preseden wilayah ikonik lainnya untuk memberi label miras dengan nama daerahnya. Mumpung belum mencegah jangan sampai nama-nama ikonik wilayah di DIY digunakan untuk melabeli miras.

Selain itu, kita juga mendorong agar pengawasan peredaran miras, termasuk yang telah mengantongi izin, diperketat. Pengetatan itu menyangkut kandungan alkohol dan wilayah edarnya. Jangan sampai miras tersebut mudah diakses anak-anak, termasuk pelajar, karena sering menjadi sumber keributan, baik dalam bentuk aksi tawuran maupun tindak kejahatan lainnya. Perizinan untuk memproduksi dan mengedarkan miras juga harus diperketat dan hanya dibolehkan untuk kalangan terbatas.

Pemerintah daerah diingatkan untuk tidak hanya mengejar pendapatan daerah melalui pajak atau cukai miras, namun malah mengabaikan potensi kerusakan moral akibat pengaruh miras. Memberantas miras memang tidak bisa dilakukan secara frontal, melainkan harus bertahap, namun pasti. Alangkah indahnya mewujudkan Yogya tanpa miras, sebuah harapan yang masih relevan untuk diupayakan. □ - d

Reparasi Demokrasi Kita



BERBAGAI kontroversi mewarnai perjalanan pemerintahan selama 150 hari. Salah satunya soal demokratisasi di Indonesia yang kian mengkhawatirkan.

Economist Intelligence Unit (EIU) pada tahun 2024 memberi skor indeks demokrasi Indonesia sebesar 6,44 dari skala 0-10 dan menempatkan Indonesia pada peringkat ke 59 dari 167 negara. Senada dengan hal tersebut, laporan dari Freedom House juga memperlihatkan adanya tren penurunan skor kebebasan sipil dan politik dari 62 pada tahun 2019 menjadi 57 pada 2024.

Data degradasi demokrasi Indonesia juga ditunjukkan secara kualitatif. Pengiriman kepala babi dan bangkai tikus ke kantor Tempo merupakan ancaman serius. Begitu juga dengan fakta bahwa ada jurnalis yang dibunuh di Banjarnbaru. Meskipun kedua peristiwa ini tidak berkaitan langsung dengan *freedom of speech*, namun setidaknya ini merupakan sinyal gawat darurat bagi demokratisasi di Indonesia.

Kekawatiran masyarakat ini bukan tanpa alasan. Jauh sebelum rezim ini berkuasa, masyarakat pernah ditunjukkan oleh berbagai teror terhadap demokrasi pada saat pemerintahan Orde Baru. Saat itu, siapapun yang bersuara miring memiliki risiko dituduh aparat. Artinya, masyarakat wajar saja jika kemudian was-was terhadap kemungkinan pemerintahan Orde Baru kembali lahir.

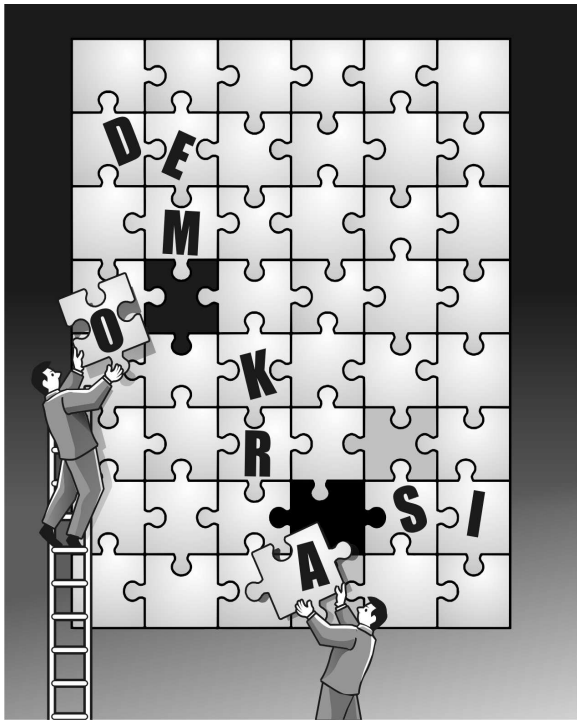
Kecemasan masyarakat tersebut kemudian coba direspons presiden dengan membuat video wawancara bersama 7 jurnalis selama 3 jam. Walau terkesan memberi angin segar, video wawancara itu belum meredakan kecemasan masyarakat dikarenakan beberapa pertanyaan tidak dijawab secara gamblang. Sebagai contoh, pertanyaan mengenai ancaman terhadap demokratisasi dijawab presiden tentang adanya demonstrasi bayaran. Jika sudah begini, ada reparasi yang harus dilakukan kita sebagai bangsa di dalam mengembalikan lagi semangat demokrasi. Perbaikan macam apa yang dimaksud?

Legislatif

Salah satu yang harus kita perbaiki adalah peran legislatif. Penguatan leg-

Satria Aji Imawan

islatif memungkinkan mengingat pemenang Pileg 2024 adalah partai oposisi. Jika rezim sebagai eksekutif memiliki fungsi untuk menjalankan pemerintahan maka legislatif bertugas melakukan *check and balances* terhadap jalannya pemerintahan. Ditinjau dari hal ini, legislatif memiliki peran sentral di dalam penegakan demokrasi melalui supervisi pelaksanaan pemerintahan.



KR-JOKO SANTOSO

Urgensi memperkuat legislatif wajar di dalam iklim demokrasi. Amerika Serikat misalnya, memiliki mekanisme apabila Partai Republik berkuasa maka Partai Demokrat menjadi oposisi dari kekuasaan tersebut, begitu juga sebaliknya. Tujuan dari pembagian peran antarpenguasa dan oposisi ditujukan agar pendulum pemerintahan tetap berjalan secara seimbang.

Keuntungan dari aktivasi oposisi di dalam legislatif juga akan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan kita. Singkatnya, apabila oposisi mampu mengkritisi proses kebijakan maka tahapan pembangunan dapat berkualitas. Begitu juga jika oposisi dapat kritis terhadap pembangunan maka kebijakan juga akan turut berkualitas. Artinya, balutan kritisme yang diusung oposisi di parlemen sangat penting di dalam peningkatan kualitas pemerintahan.

Civil Society

Upaya lain yang dapat dilakukan adalah penguatan kembali masyarakat sipil (*civil society*). Sejalan dengan pen-

jelasan di atas, penguatan legislatif akan terasa sia-sia bila masyarakat sipil juga tidak diperkuat. Fungsi masyarakat sipil cukup krusial dalam memberikan *input* kepada legislatif mengenai jalannya pemerintahan.

Pentingnya peran *civil society* ini tergambar dari kutipan terkenal Abraham Lincoln bahwa demokrasi itu berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Quotes tersebut memperlihatkan bahwa basis dasar demokrasi itu adalah masyarakat madani, sehingga bila masyarakat sipil kuat maka kuat pula demokrasi di suatu negara. Hal ini agaknya perlu diperhatikan oleh pemerintah sekarang.

Kolaborasi kekuatan legislatif dan masyarakat sipil akan berdampak kepada advokasi kebijakan yang paripurna. Basis data aduan yang dibawa masyarakat dan ditunjukkan kepada legislatif akan semakin sempurna karena adanya *mix and match* antara apa yang direncanakan maupun dijalankan oleh pemerintah. Kekuatan keduanya nantinya juga dapat berdampak kepada kenaikan indeks demokrasi kita.

Setidaknya kedua cara tersebut mampu mengembalikan kekuatan demokrasi Indonesia kepada marwahnya. Indonesia masih dikagumi sebagai salah satu negara dengan demokrasi terbesar di dunia. Kebesaran demokrasi Indonesia terletak pada bagaimana situasi konduif terjadi di tengah perbedaan, sehingga persoalan manajerial seperti ini tidak seharusnya menyurutkan langkah kita untuk memperbaiki dan memperkuat demokrasi negeri kita tercinta. (*)-d *)**Satria Aji Imawan SIP MPA, Dosen Departemen Administrasi Publik di FISIP UNDI** dan *Direktur Operasional di Kolaborasi Strategis (KOLASSE) Indonesia.*

Persyaratan Menulis

Pembaca yang budiman, terimakasih partisipasinya dalam menulis dan mengirimkan artikel untuk SKH *Kedaulatan Rakyat*. Selanjutnya redaksi hanya menerima tulisan lewat email : opinikr@gmail.com dengan panjang tulisan antara 535 - 575 kata, dengan mengisi subjek mengenai isu yang ditulis serta jangan lupa menampilkan fotocopy identitas dan foto diri. Terimakasih.

Kedaulatan Rakyat

SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers)
No. 127/SK/MENPEN/SIUPP/A.7/1986 tanggal 4 Desember 1990.
Anggota SPS. **ISSN**: 0852-6486.
Penerbit: PT-BP Kedaulatan Rakyat Yogyakarta,
Terbit Perdana: Tanggal 27 September 1945.
Perintis: H Samawi (1913 - 1984) M Wonohito (1912 - 1984).
Penerus: Dr H Soemadi M Wonohito SH (1985-2008), dr H Gun Nugroho Samawi (2011-2019) **Komisaris Utama**: Imam Satriyadi, SH.
Komisaris: Mohammad Wirmon Samawi, SE., MIB.
Direktur Utama: Drs. H.Mohammad Idham Samawi.
Direktur Keuangan: Yuriya Nugroho Samawi, SE., MM., MSc.
Direktur Pemasaran: Fajar Kusumawardhani SE.
Direktur Produksi: Baskoro Jati Prabowo SSos.
Direktur Litbang, Pengawasan & Bisnis: Yoeke Indra Agung Laksana, SE
Direktur Umum: Ir. Dyah Sardjuningrum Sitawati.

Pemimpin Umum: Drs. H. Mohammad Idham Samawi. **Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab**: Dr Drs H Octo Lampito MPd. **Wakil Pemimpin Redaksi**: Drs H Ahmad Luthfie MA. Dr Ronny Sugiantoro, MM,CHE. **Redaktur Pelaksana**: Primaswolo Sudjono SPT, Joko Budhiarto, Mussahada, Drs Widyo Suprayogi. **Manajer Produksi Redaksi**: Ngabdul Wakid. **Redaktur**: Drs H Hudono SH, Drs Swasto Dayanto, Husein Effendi SSI, MN Hassan, Drs Jayadi K Kastari, Subchan Mustafa, Drs Hasto Sutadi, Muhammad Fauzi SSos, Retno Wulandari SSos, H M Sobirin, Linggar Sumukti, Latief Noor Rochmans. **Fotografer**: Effy Widjono Putro, Surya Adi Lesmana. **Grafis** : Joko Santoso SSn, Bagus Wijanarko. **Sekretaris Redaksi**: Dra Hj Supriyatin.
Kepala TU Langganan: Drs Asri Salman, Telp (0274)- 565685 (Hunting)
Manajer Iklan: Agung Susilo SE, Telp (0274) - 565685 (Hunting) Fax: (0274) 555660. E-mail: iklan@kr.co.id, iklanlkrk23@yahoo.com, iklanlkrk13@gmail.com.
Langganan per bulan termasuk 'Kedaulatan Rakyat Minggu'... Rp 90.000,00, Iklan Umum/Display...Rp 27.500,00/mm klm, Iklan Keluarga...Rp 12.000,00 /mm klm, Iklan Baris/Cilik (min. 3 baris. maks. 10 baris). Rp 12.000,00 /baris, Iklan Satu Kolom (min. 30 mm. maks. 100 mm) Rp 12.000,00 /mm klm, Iklan Khusus: Ukuran 1 klm x 45 mm .. Rp 210.000,00, (Wisuda lulus studi D1 s/d S1, Pernikahan, Ulang Tahun) ● Iklan Warna: Full Colour Rp 51.000,00/ mm klm (min. 600 mm klm), Iklan Kuping (2 klm x 40 mm) 500% dari tarif. Iklan Halaman I: 300 % dari tarif (min. 2 klm x 30 mm, maks. 2 klm x 150 mm). Iklan Halaman Terakhir: 200% dari tarif. Tarif iklan tersebut belum termasuk PPN 10%
Alamat Kantor Utama dan Redaksi: Jalan Margo Utomo 40, Gowongan, Jetis, Yogyakarta, 55232. Fax (0274) - 563125, Telp (0274) - 565685 (Hunting)
Alamat Percetakan: Jalan RayaYogya - Solo Km 11 Sleman Yogyakarta 55573, Telp (0274) - 496549 dan (0274) - 496449. Isi di luar tanggungjawab percetakan
Alamat Homepage: http://www.kr.co.id dan www.krjogja.com. **Alamat e-mail**: naskahkr@gmail.com. **Radio** : KR Radio 107.2 FM.
Bank: Bank BNI - Rek: 003.0440.854 Cabang Yogyakarta.
Perwakilan dan Biro:
Jakarta: Jalan Utan Kayu No. 104B, Jakarta Timur 13120, Telp (021) 8563602/Fax (021) 8500529. **Kuasa Direksi**: Ir Ita Indirani.
Wartawan : H Ishaq Zubaedi Raqib, Syaifullah Hadmar, Muchlis Ibrahim, Rini Suryati, Ida Lumongga Ritonga.
Semarang : Jalan Lampersari No.62, Semarang, Telp (024) 8315792. Kepala Perwakilan: Budiono Isman, Wakil : Isdiyanto Isman SIP.
Banyumas : Jalan Prof Moh Yamin No. 18, RT 7 RW 03 Karangklesem, Purwokerto Selatan, Telp (0281) 622244. Kepala Perwakilan: Ach Pujiyanto SPd, Wakil : Driyanto.
Klaten : Jalan Pandanaran Ruko No 2-3, Bendogantungan Klaten, Telp (0272) 322756. Kepala Perwakilan : Sri Warsiti.
Kulonprogo : Jalan Veteran No 16, Wates, Telp (0274) 774738. Pj. Kepala Perwakilan: Muslikhah. Wakil : Asrul Sani.
Gunungkidul : Jalan Sri Tanjung No 4 Purwosari, Wonosari, Telp (0274) 393562. Kepala Perwakilan: Drs Guno Indarjo, Wakil: Wuragil Dedy TP.

- Wartawan KR tidak menerima imbalan terkait dengan pemberitaan -
Wartawan KR dilengkapi kartu pers/surat tugas.

Keselamatan Bangunan 'Under Construction' Terhadap Gempa



GEMPA yang mengguncang Myanmar dan Thailand beberapa waktu lalu termasuk gempa besar. Gempa berkekuatan 7,7 skala Richter termasuk gempa *major* (7,0 - 7,9 skala Richter), sebagai perbandingan gempa yang terjadi di Bantul DIY berkekuatan 5,9 skala Richter termasuk *moderate* (5,0 sampai 5,9 skala Richter). Skala Richter adalah skala yang menunjukkan energi gempa. Pengertian skala Richter di masyarakat selalu dikaitkan langsung dengan efek yang ditimbulkan, terutama kerusakan pada bangunan. Padahal pemahaman tersebut kurang tepat. Akibat yang ditimbulkan terhadap bangunan masih dipengaruhi lagi dengan jarak pusat gempa ke bangunan yang terdampak.

Sebagai gambaran skala Richter dimisalkan sebagai ukuran petasan atau mercon. Petasan kecil (ibarat skala Richter kecil) yang meledak pada saat dipegang (pusat gempa dangkal) bisa jadi lebih berbahaya dibanding petasan besar (ibarat skala Richter besar) yang meledak di tempat yang jauh (pusat gempa dalam). Kondisi tanah di bawah bangunan juga berpengaruh terhadap efek yang ditimbulkan. Bangunan yang berdiri di atas tanah lunak akan mengalami dampak yang lebih besar dibanding bangunan yang berdiri di atas tanah keras. Tanah lunak (tanah liat, endapan dll) akan memperkuat getaran gempa, sedang tanah keras (batuan padat, batu kapur dll) cenderung meredam getaran gempa.

Kenaikan skala Richter menunjukkan kenaikan energi sebesar 10 pangkat kenaikan skala tersebut. Sebagai contoh gempa berkekuatan 5 skala Richter dan gempa berkekuatan 7 skala Richter (selisih 2 skala) maka peningkatan energinya bukan naik 2 skala melainkan 102 atau 100 kalinya.

Efek guncangan gempa berupa gerakan tanah (*ground motion*) sekitar 10 kali untuk setiap kenaikan skalanya.

Prasetya Adi

Masyarakat Yogya pernah merasakan dahsyatnya gempa pada 27 Mei 2006. Kebetulan gempa tersebut memiliki kedalaman pusat gempa yang sama dengan yang terjadi di Myanmar, yaitu 10 km, bisa dibayangkan dahsyatnya gempa Myanmar melalui perhitungan sederhana berikut : Selisih kekuatan gempa 7,7 - 5,9 = 1,8 skala Richter
Energi gempa = 101,8 = 63 kali. Guncangan yang terjadi 10 x 1,8 = 18 kali. Secara sederhana dapat digambarkan bahwa gempa di Myanmar memiliki energi 63 kali dan guncangan 18 kali lebih kuat dibanding gempa Yogya 2006.

Investasi bangunan yang dirancang untuk aman terhadap gempa menjadi mahal karena semakin kuat gempa kian jarang kemungkinan terjadinya, namun bukan berarti bisa diabaikan. Kemungkinan bangunan yang sedang dalam proses pembangunan mengalami gempa tentu juga lebih kecil lagi. Pada kejadian gempa Myanmar diperlihatkan sebuah video yang merekam runtuhnya bangunan yang sedang dalam proses pengerjaan. Perancangan bangunan saat ini tentu menggunakan bantuan komputer dan perangkat lunak yang canggih. Umumnya bangunan dirancang dalam kondisi beban kerja dan semua komponen sudah terpasang sempurna. Komponen bangunan dirancang untuk saling memberikan kekuatan satu sama lain. Perhitungan bangunan *under construction* umum dilakukan pada bangunan-bangunan jembatan, karena terkadang beban *under construction* bisa jadi lebih besar daripada saat layanan.

Dalam ilmu mekanika keseimbangan terdapat 3 kondisi, yaitu keseimbangan labil, netral dan stabil. Kelereng yang diletakkan di atas bola berada dalam keseimbangan labil, sedang kelereng yang berada di

dalam mangkuk berada dalam keseimbangan stabil. Sebagai contoh sebuah struktur kuda-kuda yang masih terpasang sendiri dan belum terhubung dengan yang lain akan terjadi keseimbangan labil, artinya sedikit gangguan bisa mengakibatkan kuda-kuda ambruk, jika sudah terhubung satu sama lain maka akan terbentuk keseimbangan stabil.

Belajar dari keruntuhan bangunan *under construction* pada gempa Myanmar patut diperhatikan kestabilan bangunan atau komponen pendukung pada saat proses pembangunan yang mungkin belum terhubung sempurna seperti dalam perencanaan. Keberadaan tumpukan material dan penempatan peralatan berat yang sekiranya dapat mengganggu kestabilan perlu diperhatikan. Kestabilan perancah penahan sementara komponen struktur maupun para pekerja juga sepatutnya mendapatkan perhatian. Komponen bangunan yang belum stabil karena belum menyatu dengan komponen yang lain perlu dipasang perkuatan sementara untuk menjaga kestabilan. (*)-d *)**Prasetya Adi ST MT, Staf pengajar Program Studi Teknik Sipil Universitas Janabadra.**

Pojok KR

Awal tahun 2025, BPOM rilis 16 kosmetik berbahaya.
- **Jangan-jangan sudah beredar di Yogya.**

Kasus perintangan perkara, Kejagung tetapkan 3 tersangka.
- **Asal jangan salah tangkap.**

Soal miras merek Kaliurang, Pemda DIY tekankan pengawasan.
- **Butuh ketegasan aparat.**

Berabe